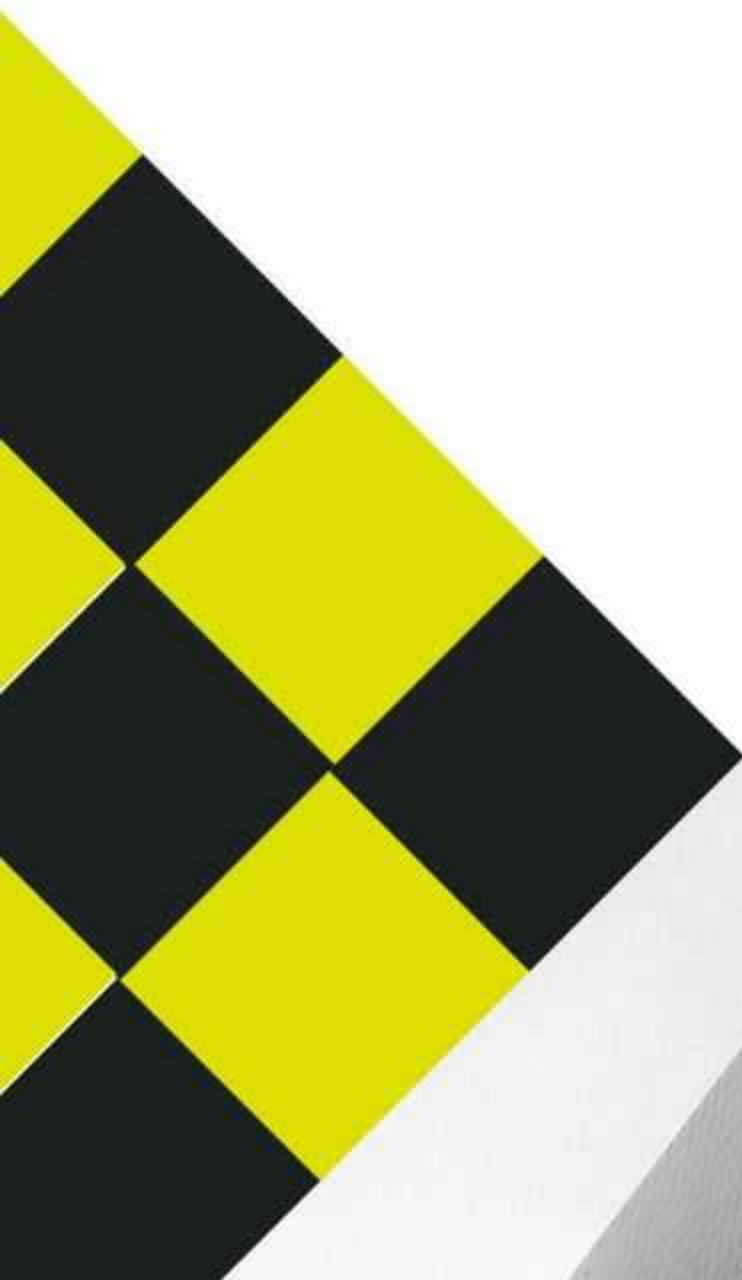




**SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
2021-2026
BIRO ORGANISASI**



DAFTAR ISI
RENSTRA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI	1
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah mencapai target.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3. Telahaan Renstra Perangkat Daerah.....	37
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	41
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN	61
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIRO ORGANISASI	72
BAB VIII :PENUTUP	75



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program / kegiatan serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah dari sisi sistem perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dari sisi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan rencana strategis secara berkualitas adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja, disamping itu, rencana strategis perangkat daerah juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu perangkat daerah dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, rencana strategis perangkat daerah juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu perangkat daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Rencana Strategis Biro Organisasi 2021-2026 dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja beserta target kinerja dan tahapan dalam penyusunan perubahan rencana strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah 2021-2026 dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Di Llingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 nomor 62);
19. Peratuan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 68);

20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 70);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 85).
22. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Perubahan rencana strategis Biro Organisasi 2021-2026 adalah untuk memayungi dan memberikan arah penyusunan perencanaan tahunan Biro Organisasi tahun 2021 – 2026, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dalam mewujudkan tujuan Biro Organisasi dengan sasaran strategis serta tindakan yang akan dilaksanakan dan ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Memberikan arah dalam penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Biro Organisasi tahun 2021-2026.
- c. Menyediakan pedoman untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi dalam rangka penguatan ketatalaksanaan, penguatan kinerja. Penguatan kelembagaan sebagai wujud melaksanakan reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII : PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Biro Organisasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 pasal 19 ayat (2) Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

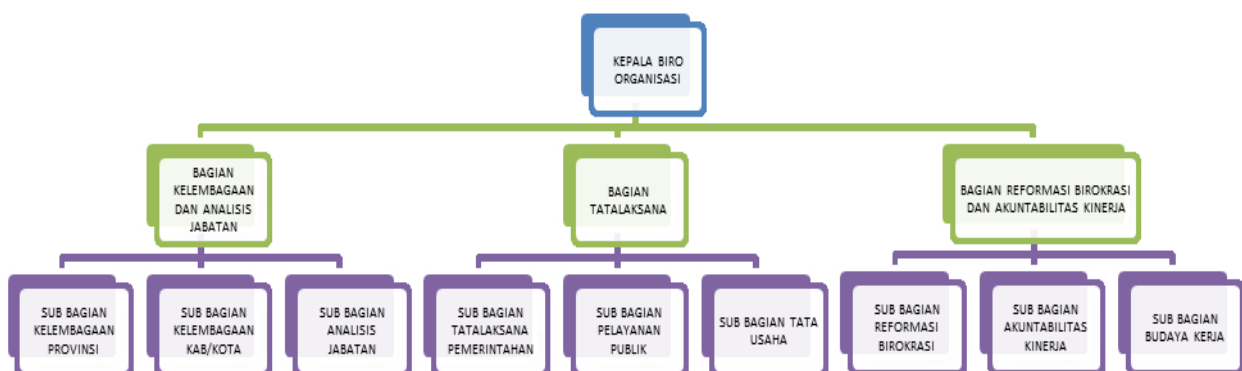
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja serta ketatalaksanaan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja serta ketatalaksanaan.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan analisa jabatan, pengembangan kinerja serta ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
 - a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 - b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan
2. Bagian Tatalaksana
 - a. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik
 - c. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Sub Bagian Reformasi Birokrasi
 - b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - c. Sub Bagian Budaya Kerja

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada Bagan 1.

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



dari masing - masing bagian sebagai berikut:

1. *Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan.;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan.;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

2. *Bagian Tatalaksana*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

3. *Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja*

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro organisasi dipimpin oleh seorang kepala biro organisasi dan dalam melaksanakan tugas kepala dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala bagian yaitu Kepala Bagian Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, dimana secara langsung Kepala Bagian bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi. Berikut dapat ini dijelaskan uraian tugas kepala Biro Organisasi dan uraian tugas 3 (tiga) Kepala Bagian yang membantu pelaksanaan tugasnya, serta setiap Kepala Bagian secara struktur dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian tugas dari Biro Organisasi adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dari Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan,

membawahi :

1. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi

Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan analisis kebijakan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kebijakan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota

Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan analisis kebijakan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kebijakan kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

- f. menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. *Sub Bagian Analisis Jabatan*

Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- c. menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan;
- d. menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- e. menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- g. mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemamfaatan hasil analisis jabatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan provinsi dan kabupaten/kota;
- i. membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan kabupaten/kota;
- j. membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan kabupaten/kota; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dari Bagian Tatalaksana

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Bagian Tata Laksana, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan

Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Pelayanan Publik

Sub Bagian Pelayanan Publik memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan daerah;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang Pelayanan Publik;
- e. mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;
- f. mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut;
- g. menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
- h. menggordinasikan pelayanan dasar;
- i. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan daerah;
- j. melaksanakan monitoring di bidang Pelayanan Publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTR), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dari Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :

1. Sub Bagian Reformasi Birokrasi

Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8 (delapan) area perubahan (penataan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, hukum, pengawasan, akuntabilitas, manajemen perubahan dan pelaporan publik);

- b. mengkoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan;
- c. membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan;
- d. melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengkaji dan analisis di bidang Akuntabilitas Kinerja;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang Akuntabilitas Kinerja;
- c. melaksanakan monitoring sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan SAKIP Kabupaten/Kota
- d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Gubernur
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Budaya Kerja

Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan teknis bidang peningkatan budaya kerja;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja;
- d. memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi per 31 Oktober 2021 meliputi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 31 orang dengan rincian menurut Golongan dan Pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap
Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Oktober 2021

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	3	2					5
III	4	14	1	3			22
II				3			3
I							
PTT			1				1
Jumlah	7	16	2	6			31

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi berupa peralatan dan perlengkapan kantor meliputi meja dan kursi, komputer, laptop, almari dan filling kabinet. Jumlah aset yang dimiliki oleh Biro Organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Daftar Sarana Dan Prasarana Biro Organisasi
Per 31 Oktober 2021

	Jenis Barang>Nama Barang	Merek / Type	Ukuran / Cc	Th. Pembelian	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan / Tahun (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Roda 4	Innova	2000		8.697.000,00	3.587.125,00	134.348.500,00	134.348.500,00
2	Kendaraan Roda 4	Kuda/Mini Bus	2000		15.000.000,00	14.375.000,00	115.000.000,00	-
3	Sepeda Motor	HONDA	-		4.226.200,00	1.778.275,00	1.778.275,00	12.447.925,00
4	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang		65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
5	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang		65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
6	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang		65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
7	Mesin TIK	Royal	Besar		3.941.600,00	788.320,00	3.941.600,00	0,00

8	Lemari Besi	Datascript	Besar		474.000,00	94.800,00	474.000,00	0,00
9	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang		5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang		2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
11	Filling Kabinet	Datascrip	Sedang		37.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
12	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang		2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
13	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang		5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
14	Filling Kabinet	Lion	Besar		2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
15	Filling Kabinet	Lion	Besar		2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
16	Filling Kabinet	Lion	Besar		2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
17	Filling Kabinet	Lion	Besar		5.660.800,00	1.132.160,00	3.396.480,00	2.264.320,00
18	Brangkas	Lion	-		3.981.000,00	796.200,00	3.981.000,00	0,00
19	Sketsel	-	Besar		9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
20	White Board	-	Besar		12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00
21	Projektor (Infokus)	Sony	Besar		9.825.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	15.860.000,00
22	Lemari Kayu	-	Kecil		355.000,00	71.000,00	355.000,00	0,00
23	Meja Kayu	-	-		462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
24	Meja kayu	1/2Biro	-		811.333,33	162.266,67	811.333,33	0,00
25	Meja kayu	1/2Biro	-		1.622.666,67	324.533,33	1.622.666,67	0,00
26	Kursi Besi	Futura	-		412.000,00	82.400,00	412.000,00	0,00
27	Kursi Besi	Futura	Sedang		807.636,36	161.527,27	807.636,36	0,00
28	Kursi Besi	Futura	Sedang		1.009.545,45	201.909,09	1.009.545,45	0,00
29	Kursi kerja	-	-		69.000,00	13.800,00	69.000,00	0,00
30	Kursi Besi	Futura	-		655.000,00	131.000,00	655.000,00	0,00
31	Meja Telepon	-	Kecil		148.000,00	29.600,00	148.000,00	0,00
32	Meja Rpat Panjang	-	Besar		2.280.000,00	456.000,00	2.280.000,00	0,00
33	Kursi Rapat	-	-		4.620.000,00	924.000,00	4.620.000,00	0,00
34	Kursi Rapat	-	-		2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
35	Kursi Rapat	Eda	-		2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00

36	Kursi Tamu	Jati	Sedang		6.375.000,00	1.275.000,00	6.375.000,00	0,00
37	Kursi Tamu	Manaco Ovel 3211	Besar		14.900.000,00	2.980.000,00	14.900.000,00	0,00
38	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar		2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
39	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar		2.208.800,00	441.760,00	2.208.800,00	0,00
40	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar		1.012.500,00	202.500,00	1.012.500,00	0,00
41	Kursi Puter Eselon III	Yubi	Besar		4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
42	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar		2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
43	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar		2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
44	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar		2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
45	Kursi Warna Ping Putar	-	Sedang		4.134.000,00	826.800,00	4.134.000,00	0,00
46	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar		2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
47	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar		4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
48	Kursi Putar Rapat	Eda	Sedang		6.888.000,00	1.377.600,00	6.888.000,00	0,00
49	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900		2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
50	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900		2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
51	Meja Kerja	-	1/2 biro		213.818,18	42.763,64	213.818,18	0,00
52	Meja Kerja	-	1/2 biro		249.454,55	49.890,91	249.454,55	0,00
53	Meja Kerja	-	1/2 biro		320.727,27	64.145,45	320.727,27	0,00
54	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang		2.013.000,00	402.600,00	2.013.000,00	0,00
55	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang		6.039.000,00	1.207.800,00	6.039.000,00	0,00
56	Kulkas	Panasonic	Besar		3.084.800,00	616.960,00	3.084.800,00	0,00
57	Air Conditining	Panasonic/LG	1 1/2 Pk		5.320.000,00	1.064.000,00	5.320.000,00	0,00
58	Air Conconditioning	Panasonic	1 1/2 Pk		6.575.000,00	3.315.000,00	16.575.000,00	0,00
59	Kamera	Canon	Besar		2.845.050,00	2.569.010,00	2.569.010,00	10.276.040,00
60	Wiraless Toa	Toa	Sedang		.690.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	5.352.000,00
61	Komputer (PC)	ACER	Pintium 4		6.715.000,00	1.678.750,00	6.715.000,00	0,00
62	Komputer)PC)	Acer	Pintium 4		6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
63	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar		8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
64	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar		8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00

65	Komputer/PC	HP PAVILION	BESAR		8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
66	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar		8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
67	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar		8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
68	Komputer PC	HP	-		7.532.996,00	4.383.249,00	4.383.249,00	13.149.747,00
69	Komputer PC	LENOVO	Sedang		7.600.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	20.700.000,00
70	Note Book (Lap Top)	Sony Vaio VGN TT-	Kecil		3.800.000,00	5.950.000,00	23.800.000,00	0,00
71	Note Book (Lap Top)	Acer (Procesor T6600)	Besar		7.900.000,00	1.975.000,00	7.900.000,00	0,00
72	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar		1.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
73	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar		1.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
74	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar		9.750.000,00	2.437.500,00	9.750.000,00	0,00
75	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar		9.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
76	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar		9.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
77	Note Book	Toshiba	Besar		0.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
78	Note Book	ASUS	-		2.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	9.375.000,00
79	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang		1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
80	Printer	HP Laser Jet 1020	-		1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
81	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang		1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
82	Printer	HP	-		950.000,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00
83	Komputer	Advandace	-		3.743.000,00	935.750,00	3.743.000,00	0,00
84	Komputer	Acer	Pintium 4		6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
85	Komputer	AC511	Pintium 4		1.465.000,00	2.866.250,00	11.465.000,00	0,00
86	Komputer	Acer	Pintium 4		1.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
87	Komputer	Acer	Pintium 4		0.500.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00	0,00
88	Komputer	Acer Aspir M5641	Pintium 4		1.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
89	Komputer	Acer	Pintium 4		1.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
90	Komputer	Asus	Besar		9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
91	Komputer/PC	Asus	Sedang		9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
92	Monotor LCD	Samsung Sync Master B 1630	Besar		3.094.160,00	773.540,00	3.094.160,00	0,00

93	Printer	HP Laser Jet	1020		750.000,00	187.500,00	750.000,00	0,00
94	Printer	CANON PIXMA	Besar		2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
95	Printer	HP LASER JET P1005	Besar		2.500.000,00	625.000,00	2.500.000,00	0,00
96	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar		1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
97	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar		1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
98	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar		3.300.000,00	825.000,00	3.300.000,00	0,00
99	Printer	HP	Sedang		3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
00	Printer HP Laser Jet CP1025	HP Laser Jet	Besar		1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
101	Meja Kayu	-	-		462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
102	Kursi Kerja Eselon II	Ergonic 708 Hidrolik	Besar		2.800.000,00	560.000,00	2.800.000,00	0,00
103	Meja Kerja	-	-		35.666,99	7.133,40	35.666,99	0,00
104	Meja Kerja	-	-		71.333,33	14.266,67	71.333,33	0,00
105	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900 Hidrolik	Besar		2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
106	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900 Hidrolik	Besar		2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
107	Kursi Kerja Eselon II	-	-		2.700.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
108	Kursi Kerja Eselon III	-	-		2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00
109	TV LCD 32 inci	Panasonic	32 inci		0.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
110	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonic	Sedang/K Ec		1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
111	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonic	Sedang/K Ec		1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
112	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D06	Sedang		17.400.000,00	870.000,00	6.960.000,-	10.440.000,00
113	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D26	Sedang		4.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
114	Komputer/PC	Lenovo	<i>Inrel Core i3- 5005U</i>		18.400.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
115	Komputer/PC	HP 20-CU39D	Intel Core i3- 6100U		18.200.000,00	4.550.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
116	Notebook/Lap Top	Asus X456UQ- FA029D	Intel Corei—7 6500U		26.000.000,00	6.500.000,-	13.000.000,00	13.000.000,00
117	Printer	Canon	IP2770		2.000.000,00	500.000,-	1.000.000,00	1.000.000,00
118	Printer	Epson	M.200		5.500.000,00	1.375.000,00	2.750.000,-	2.750.000,00
119	Meja Rapat	½ Biro	120x 60 cm		9.365.994,00	1.873.198.80	1.873.198.80	7.492.795.20
120	Kursi Rapat	Futura	Sedang		5.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00
121	Kursi Rapat	Chairman	Sedang		2.400.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00

122	AC	Sharp	2 PK		9.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00
123	AC	Sharp	2 PK		19.200.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	15.360.000,00
124	Komputer/ PC	All In HP 20-C303D	7200 U		24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
125	Lemari	Prospek	KBBD 06		6.600.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	5.280.000,00
126	Lemari	Prospek	5 Tingkat		13.200.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.560.000,00
127	Kursi Rapat	Futura	416		20.790.000	-	-	-
128	Kursi Kerja Pimpinan	Italiano	S-094A		9.460.000	1.892.000	1.892.000	7.568.000
129	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8		7.370.000	1.474.000	1.474.000	5.896.000
130	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8		14.740.000	2.948.000	2.948.000	11.792.000
131	Meja Kerja Pejabat	Grand carlito	CA2021ES		13.500.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000
132	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168		12.000.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
133	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168		24.000.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000
134	Komputer PC	Asus	V22		10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
135	Komputer PC	Asus	V22		10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
136	Komputer PC	Asus	V22		21.800.000	5.450.000	5.450.000	16.350.000
137	Printer	EPSON	M200		11.000.000	2.750.000	2.750.000	8.250.000
138	Infocus	Infocus In 114xv	IN114XV		14.450.000	2.890.000	2.890.000	11.560.000
139	Layar Projector Otomatis	Wall screen Focus	120X 120		9.800.000	1.960.000	1.960.000	7.840.000
40	Kendaraan Dinas Operasional	Toyota	Kijang Inova 2.0 GM/A LUX VIN		303.750.000	37.968.750	37.968.750	265.781.250
141	Air Conditioner	Panasonic	CS-YN 18TKP-R32		39.600.000	7.920.000	7.920.000	31.680.000
142	Scanner	EPSON	DS-570W		12.750.000	3.187.500	3.187.500	9.562.000
143	Penghancur Kertas	Promaxi	S290		4.500.000	900.000	900.000	3.600.000
144	Lemari Arsip/Dokumen	Lemari Dokumen	2x2.30 Meter		7.700.000	1.540.000	1.540.000	6.160.000
145	Personal Computer/Desktop	HP	21.51 N		22.298.600	-	-	-
146	Laptop	Lenovo	14 Inchi		12.608.600	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pelayanan Biro Organisasi mencakup pelayanan kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan ketatalaksanaan, pelayanan penguatan akuntabilitas kinerja, pelayanan peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan pendayagunaan aparatur serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran yang telah dicapai untuk periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda
3. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan
4. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang diukur berdasarkan capaian kinerja 6 (enam) sasaran tersebut diatas, selanjut dapat dilihat pada tabel T-C.23.

TABEL T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sasaran sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Ket
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi		-			BB						BB					100%						Sebelum Revisi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		-				2	5	5	7			1	3	4				50	60	80		Setelah revisi
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Penda		-						12	12,3					11,70							97,5	
-	Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran				51	55					51	75					100	136					Sebelum Revisi
3	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan						60	70	90	90			76	80	90				127	114	100		Setelah Revisi
-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					75						80,78						107					Sebelum Revisi
4	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik						10	10	10	12			10	10	10				100	100	100		Setelah Revisi
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik								40	50					78							195	
-	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					B						BB						100					Sebelum Revisi
					100	100						100						100					
6	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi				95	95	BB	BB	BB	BB			BB	BB	BB				100	100	100		Setelah Revisi

Dari tabel T-C.23. dapat dilihat, bahwa kinerja pelayanan Biro Organisasi yang telah mencapai atau diatas target adalah sebagai berikut:

A. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Yang Telah Mencapai Target

1. Pelayanan ketatalaksanaan

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan adalah Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dengan indikator kinerja jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang telah menyusun SOP, target 50 (lima puluh) Perangkat Daerah sampai tahun kelima Renstra Perangkat Daerah (2021) telah direalisasi sebanyak 50 (lima puluh) Perangkat Daerah dengan tingkat capaian 100 %. Dan telah melaksanakan evaluasi terhadap 46 unit kerja, target lain yang mencapai target adalah telah selesainya penyusunan proses bisnis pemerintah provinsi sumatera barat dan selanjutnya akan melakukan bimbingan penyusunan dan verifikasi peta proses bisnis pemerintah provinsi sumatera barat.

Keberhasilan ini disebabkan, adanya perhatian dan komitmen yang tinggi dari Gubernur terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya aspek ketatalaksanaan atau bisnis proses pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pelayanan penguatan akuntabilitas kinerja

Pelayanan penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator kinerja, nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi. Sampai tahun 2020, Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercapai 76,16 dengan Prediket BB. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh tingginya perhatian dan komitmen Gubernur dan Kepala Perangkat terhadap implementasi SAKIP dan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya aspek akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus untuk penyempurnaan dokumen Sistem AKIP dan implementasi SAKIP secara menyeluruh.

3. Pelayanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama 2 periode road map lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015 dan tahun 2016 – 2021. Untuk tahun 2016 – 2021 yang telah dicapai antara lain :

1. Peningkatan nilai indeks RB setiap tahun.

Berdasarkan hasil penilaian tim evaluator Reformasi Birokrasi mulai tahun 2016 terjadi peningkatan nilai reformasi birokrasi dengan tren sebagai berikut :

No	Tahun	Nilai RB	Kategori	Peningkatan Nilai	Keterangan
1.	2016	62,87	B	-	
2.	2017	65,45	B	2,58	Peningkatan terbesar
3.	2018	65,63	B	0,18	
4.	2019	66,79	B	0,16	
5.	2020	66,87	B	0,08	Peningkatan terkecil

Dari data table di atas terlihat tren peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi walaupun peningkatannya masih belum signifikan.

2. Peningkatan Jumlah Kab/Kota mengisi LKE RB

Melalui kegiatan asistensi ke 19 Kab/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Barat terjadi peningkatan jumlah Kab/Kota yang mengisi LKE. Pada tahun 2018 terdapat 6 Kab/kota yang belum ada nilai indeks RBnya, setelah dibina maka tahun 2019 hanya 1 Kabupaten saja yang tidak memiliki nilai indeks RB yaitu Kabupaten Solok Selatan. Setelah dilakukan konfirmasi ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ternyata mereka mengupload LKE terlambat sehingga tidak bisa dinilai lagi dan dimasukkan ke dalam hasil evaluasi RB.

3. Adanya Agen Perubahan dan Rencana Tindak

Agen perubahan merupakan personil yang berperan dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Mulai tahun

2018 SKPD dan Kab/kota telah mulai membentuk agen perubahan. Seiring dengan waktu agen perubahan telah ada disetiap OPD dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat, sementara di Kab/kota belum seluruhnya memiliki agen perubahan. Agen perubahan yang telah dikukuhkan melalui SK telah menyusun rencana tindak, namun realisasi rencana tindaknya belumlah optimal.

4. Terdapatnya Rencana Aksi

Rencana aksi OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah terlaksana untuk seluruh OPD. Penyusunan rencana aksi telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan saran dari tim evaluator Kemenpan pada kegiatan evaluasi RB. Sebagian besar dari kegiatan pada rencana aksi telah terlaksana dengan baik.

Faktor pendorong terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi antara lain :

1. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dengan gencar selalu melaksanakan kegiatan untuk melengkapi data yang diminta pada LKE.
2. Munculnya pemahaman yang benar terhadap LKE dan penilaian indeks RB, mendorong Kab/Kota melaksanakan penyusunan LKE RB daerah masing-masing.
3. Adanya kontinuitas sosialisasi RB, asistensi dan Bimtek pada aparatur provinsi Sumatera Barat dan Kab/kota meningkatkan pemahaman pada aktifitas reformasi birokrasi.
4. Meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan RB memberikan kontribusi pada terlaksananya kegiatan RB di lingkungannya.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi adalah :

1. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.
2. Belum optimalnya dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan RB pada daerah Kab/kota.
3. Agen perubahan belum melaksanakan kegiatan dalam mendukung terlaksananya agenda reformasi birokrasi.
4. Permintaan data pelaksanaan RB pada OPD kurang didukung sehingga susah untuk mendapatkan informasi tentang RB lengkap dan tepat waktu.

4. Pelayanan Kelembagaan

Pelayan kelembagaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan urusan, kewenangan dan kebutuhan, dengan sasaran terwujudnya tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang sesuai dengan urusan dan kewenangan, indikator kinerja persentase tugas pokok dan fungsi SKPD yang tumpang tindih target sampai akhir Renstra Perangkat Daerah (2020) 90 % direalisasi sebesar 90% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

Uraian	Anggaran (Rp.000) pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran (Rp.000) pada Tahun ke-						Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Non Urusan	583,078,807	1,212,606,469	1,707,249,907	1,005,819,362	596,108,518	633,075,450	530,889,406	1,077,026,975	1,497,542,900	941,965,408	577,969,794	0	91.0	88.8	87.7	93.7	97.0	0.0	45	31
Belanja Urusan Wajib	3,514,454,360	3,459,437,449	3,306,148,266	2,447,214,276	1,069,345,553	2,600,227,500	2,999,309,081	3,163,690,814	3,146,539,176	2,348,439,674	1,047,471,854	0	85.3	91.5	95.172	96.0	98.0	0.0	298.7	999
TOTAL PAGU	4,097,533,167	4,672,043,918	5,013,398,173	3,453,033,638	1,665,454,071	3,233,302,950	3,530,198,487	4,240,717,789	4,644,082,076	3,290,405,082	1,625,441,648	0	86.2	90.8	92.6	95.3	97.6	0.00	17.37	37

Dari tabel T-C.24. dapat dilihat, bahwa rasio realisasi dan anggaran termasuk baik dalam priode 2016-2021 adalah pada tahun 2016 sebesar 86,2%, tahun 2017 sebesar 90,8 %, dan tahun 2018 sebesar 92.6 %, tahun 2019 sebesar 95,3, tahun 2020 sebesar 97,6. sedangkan untuk ratio tahun 2021 belum bisa dihitung karna masih tahun berjalan. Baiknya realisasi dibandingkan dengan anggaran yang tersedia disebabkan karena adanya konsistensi kebijakan pelaksanaan anggaran yang diterapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Biro Organisasi dalam lima tahun ke depan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

A. Tantangan

1. Belum sesuai kompetensi sumberdaya aparatur dengan jabatan yang dipangkunya
2. Partisipasi Kabupaten/kota dan Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan program pemerintah daerah
3. Mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
4. Belum sesuai ketatalaksanaan perangkat daerah terutama dalam penerapan standar operasional prosedur dan peta proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Masih adanya penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Peluang

1. Kuantitas sumberdaya aparatur yang besar
2. Komitmen pimpinan lembaga untuk mendukung program dan visi, misi pemerintah daerah.
3. Tersedianya peraturan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perangkat daerah Prov. Sumbar dan Kab/kota yang organisasinya sudah sesuai dengan ketentuan		% SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan informasi tentang regulasi terbaru terkait tugas dan fungsi biro organisasi •Kompetensi pejabat yang membidangi untuk memberikan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dan Perangkat daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen pimpinan lembaga untuk mendukung program pemerintah daerah •Partisipasi kabu/kota dan Perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan program pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> •Masih ada Perangkat daerah Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan •Ukuran organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan. •Tumpang tindih tupoksi antar Perangkat daerah • Masih ada
		% SKPD Provinsi yang ditata kelebagaannya			
		% SKPD Provinsi yang telah dievaluasi organisasi dan tata kerjanya			
		% UPT Prov yang ditata ulang kelebagaannya sesuai peraturan yang berlaku			
		% Ka/kota yang telah dievaluasi organisasi dan tata kerjanya			

					<p>organisasi dan tata kerja di kab/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada kab/kota yang tidak melaksanakan fasilitasi dalam penataan organisasi dalam penataan perangkat daerahnya.
<p>Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota yang telah melaksanakan penataan penguatan ketatalaksanaan melalui penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis</p>		% Perangkat daerah provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintah sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi tentang regulasi penyusunan SOP dan PROBIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan terhadap pentingnya SOP dan PROBIS • Perubahan regulasi dalam pelaksanaan penyusunan SOP dan PROBIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata hubungan kerja dan ketatalaksanaan pemerintahan belum sesuai ketentuan • Belum semua perangkat daerah Provinsi menyusun SOP dan PROBIS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan • Belum semua kab/kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
		% kab/kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi aparatur dalam melaksanakan penyusunan SOP dan PROBIS 		
		% perangkat daerah prov yang menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis			
<p>Unit kerja penyelenggara pelayanan publik provinsi dan kab/kota yang telah mengembangkan fungsi pelayanan melalui inovasi pelayanan publik</p>		% unit pelayanan provinsi dan kab/kota yang telah melaksanakan inovasi dan pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan terhadap pengembangan pelayanan publik melalui inovasi • Perlunya peraturan dalam inovasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Unit Kerja Provinsi melakukan Inovasi • Belum semua UKPP menciptakan inovasi pengembangan pelayanan

Kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan pada SKPD dan UPT Prov Sumbar		% perangkat daerah provinsi yang komposisi aparturnya memiliki kelas jabatan dan sesuai dengan syarat formasi serta kompetensi yang dibutuhkan.	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan peraturan yang mengatur standar kompetensi jabatan. •Peraturan tentang pola karir. 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen terhadap penerapan standar kompetensi jabatan dan pola karir 	<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua SKPD dan UPTD Prov serta kab / kota memahami dengan baik tentang anjab, ABK, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan •Belum semua perangkat daerah dan UPTD Prov
		% UPT provinsi yang komposisi aparturnya memiliki kelas jabatan dan sesuai dengan syarat			
		formasi, serta kompetensi yang dibutuhkan			<ul style="list-style-type: none"> serta kab / kota Belum semua perangkat daerah dan UPTD Prov serta kab / kota menyusun anjab dan ABK •Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan pada SKPD dan UPTD Provinsi maupun kab/kota
		% Kab/kota yang telah dievaluasi komposisi aparturnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov Sumbar		IKM PNS	<ul style="list-style-type: none"> •Ketersediaan data informasi pelayanan. •Peraturan tentang pelaksanaan IKM 	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi dalam melaksanakan pelayanan •Ketersediaan sarana dan prasarana 	Belum dilaksanakan IKM PNS
perangkat daerah Provinsi dan Kab/kota belum semua melaksanakan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja secara		% SAKIP perangkat daerah Prov Sumbar berpredikat BB	<ul style="list-style-type: none"> •Peraturan tentang penerapan SAKIP •Bimbingan dalam penyusunan Sakip •Kompetensi aparatur dalam melaksanakan SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen pimpinan dalam penerapan SAKIP •Partisipasi Kabupaten / Kota dalam melaksanakan program SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua perangkat daerah Provinsi memiliki tim SAKIP •Belum semua Kab/kota memiliki tim SAKIP •Belum semua Kab/kota memiliki tim SAKIP
		% SAKIP Kab/kota yang berpredikat BB			

optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
perangkat daerah Prov Sumbar dan Kab/kota belum semuanya melaksanakan budaya kerja sesuai ketentuan		Jumlah KBK di perangkat daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> •Peraturan tentang pelaksanaan budaya kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> •Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan budaya kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua perangkat daerah Provinsi memiliki KBK
		Jumlah KBK Kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> •Sosialisasi tentang pentingnya budaya kerja 		<ul style="list-style-type: none"> •Belum semua perangkat daerah Kab/kota memiliki KBK

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2021-2026 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

2. Misi

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 7 butir sebagai berikut:

a.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
b.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah
c.	Meningkatnya nilai tambah dan produktifitas pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
d.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
e.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
f.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
g.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Dari 7 (tujuh) misi Gubernur dan Wakil Gubernur diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi akan mempengaruhi misi 7, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro yang dapat mempengaruhi pencapaian misi Kepala Daerah diatas adalah sebagai berikut :

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Organisasi
Terhadap Pencapaian Visi Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas			
2.	1).Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penegakkan disiplin PNS • Jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur masih kurang 	SDM pengelola tugas semua bagian masih kurang baik kuantitas maupun kualitasnya	Perda tentang pembinaan aparatur telah ada
	2).Peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penguatan komitmen pelaksanaan SAKIP • Peningkatan kualitas SDM penyusun SAKIP • Peningkatan kualitas AKIP provinsi • Belum dipahaminya teknis penyusunan PK dengan baik oleh 	Komitmen PNS untuk pelaksanaan AKIP	Adanya Komitmen gubernur untuk peningkatan SAKIP daerah.

		pejabat penyusun PK <ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukannya evaluasi PK secara berkala • Pelaporan SAKIP belum tepat waktu 		
	3). Pengelolaan e – Government Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya IT dalam pengelolaan SAKIP 	Belum optimalnya pengelolaan e government pemda.	Adanya peraturan yang mengatur Penerapan e-government pada Pemprov Sumbar
	4). Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang evaluasi perbaikan SAKIP masih kurang 	Belum adanya sosialisasi hasil evaluasi SAKIP	Informasi penyelenggaraan pemerintahan diperoleh melalui pejabat yang melakukan perjalanan dinas dan mass media.
	5).Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> • SAKIP Perangkat Daerah Prov Sumbar masih dominan C 	Masih rendahnya kompetensi PNS dalam penyusunan SAKIP	Adanya tim SAKIP Perangkat Daerah
	6.).Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Prototype Perangkat Daerah penataan kelembagaan belum ada • Perlu adanya penguatan kelembagaan dalam penerapan reformasi birokrasi 	Belum ditetapkannya Perda tentang Perangkat Daerah	Adanya komitmen yang kuat gubernur dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
	7). Pembangunan Materi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan perangkat daerah yang belum sesuai dengan peraturan yang 	Regulasi yang terkait penataan kelembagaan perangkat daerah yang	komitmen kuat dalam penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai

		berlaku	bersifat dinamis	peraturan yang berlaku.
	8).Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • SOP belum menggunakan prinsip reformasi birokrasi • SOP setiap perizinan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat • Belum optimalnya pelaksanaan SOP • Peta SOP belum ada pada masing-masing Perangkat Daerah • Lemahnya komitmen pimpinan dalam melakukan penataan ketatalaksanaan secara terencana, melembaga dan berkelanjutan. • Belum adanya survey menyeluruh tentang kualitas pelayanan publik. • Penggunaan TI untuk pelayanan publik masih parsial • Implementasi Pelayanan prima masih rendah • Masih rendahnya kompetensi, inovasi dan budaya pelayanan bermutu 	Komitmen pimpinan dalam pelayanan publik masih kurang	Perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik

3. Sasaran

Sasaran dari Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Akuntabel;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Biro Organisasi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan a. Meningkatkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinamika perubahan regulasi terkait penataan kelembagaan yang sangat dinamis	adanya komitmen dari pimpinan dalam melakukan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>) berdasarkan beban kerja
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari: - Nilai Evaluasi SAKIP Provinsi tahun 2019 masih BB (75,89). Nilai Evaluasi Baru 4 (8%) perangkat daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh Nilai SAKIP A	- Belum meratanya Pemahaman Ka. Perangkat daerah dan aparatur pengelola SAKIP di masing-masing perangkat daerah terkait implementasi SAKIP - Belum semua perangkat daerah, Kualitas dokumen SAKIP Pemerintah Daerah dan perangkat daerah	- Adanya tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar - Komitmen pimpinan untuk meningkatkan Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memperoleh nilai A - Baru 8 % perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh Nilai SAKIP A
	c. Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah	Pelaporan Kinerja sangat terkait dengan Perencanaan	Belum optimalnya analisa yang disajikan dalam	- Perbaiki tujuan dan sasaran serta

	Daerah	Kinerja. Salah satu Permasalahan dalam Pelaporan Kinerja adalah analisa upaya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran yang ditetapkan. Dalam memenuhi ini sangat diperlukan Perencanaan Kinerja yang akurat dan tepat sehingga jelas upaya yang dilakukan dan Program/Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan sasaran.	dokumen Laporan Kinerja Pemda	indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan - Perbaikan penganggaran yang lebih diprioritaskan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi d. Meningkatkan Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB - Tim Reformasi Birokrasi belum melaksanakan tugas secara optimal - Narasumber bimtek, sosialisasi dan coaching RB seringkali merubah tempat pelaksanaan acara - Terbatasnya pengetahuan ASN dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. - Belum optimalnya dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan RB pada daerah Kab/kota. - Agen perubahan belum melaksanakan kegiatan dalam mendukung terlaksananya agenda reformasi birokrasi. - Permintaan data pelaksanaan RB pada OPD kurang didukung sehingga susah untuk mendapatkan informasi tentang RB lengkap dan tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dengan gencar selalu melaksanakan kegiatan untuk melengkapi data yang diminta pada LKE. - Munculnya pemahaman yang benar terhadap LKE dan penilaian indeks RB, mendorong Kab/Kota melaksanakan penyusunan LKE RB daerah masing-masing. - Adanya kontinuitas sosialisasi RB, asistensi dan Bimtek pada aparatur provinsi Sumatera Barat dan Kab/kota meningkatkan

				<p>pemahaman pada aktifitas reformasi birokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan RB memberikan kontribusi pada terlaksananya kegiatan RB di lingkungannya
	<p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>e. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas</p>	<p>Rendahnya pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman aparatur pelayanan dalam pengembangan pelayanan - Komitmen pimpinan 	<p>Masukan dari masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik</p>
	<p>f. Penataan Ketatalaksanaan yang efektif</p>	<p>Penataan ketatalaksanaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Masih belum adanya pemahaman aparatur tentang pentingnya penataan ketatalaksanaan yang sesuai dengan ketentuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bimbingan langsung dalam penataan ketatalaksanaan pada perangkat daerah. 2. Adanya perhatian pimpinan akan pentingnya penataan ketatalaksanaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi pada prinsipnya adalah menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan kinerja organisasi serta pendayagunaan aparatur organisasi perangkat daerah. Tugas pokok ini

tidak ada hubungannya dengan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis sehingga dalam bagian ini tidak ada pembahasannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan seluruh pejabat struktural dan pejabat non struktural dilingkungan Biro Organisasi dan berdasarkan pembahasan dengan metoda dimaksud, Isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- Penyederhanaan Birokrasi pemerintah daerah
- Tuntutan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPRB) dan Peningkatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
- tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah



TUJUAN DAN SASARAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan arah bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan kinerja organisasi yang baik dan menetapkan indikator kinerja utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan disamping itu perlu juga diterapkan indikator-indikator kinerja kinerja agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta terarah, oleh karena itu secara konseptual indikator kinerja merupakan alat penting dalam membangun system pengukuran kinerja

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Mengacu pada Misi ke 7 (tujuh) Kepala Daerah sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
- b) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- c) Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi
- d) Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
- e) Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

2. **Sasaran**

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

a. Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dasar penataannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kelembagaan yang tepat fungsi dan sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan maka diperlukan penataan analisis jabatan yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi.

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah ke depannya merupakan sesuatu hal yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila sistim SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat untuk peningkatan citra pemerintah akan menampilkan hasil, karena citra itu adalah bayang bayang dari suatu kinerja.

c. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus untuk ditingkatkan. Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dari keberhasilan/kegagalan dari pencapaian tujuan/sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala Daerah dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tupoksi dari Biro Organisasi Pemprov Sumbar.

d. Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan

Area manajemen perubahan berorientasi pada perubahan pola pikir aparatur dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan nilai pada area manajemen perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan dijadikan rencana strategi pada tahun 2021-2026, yaitu :

1. Menyusun Road Map.

Dalam menyusun road map telah dilaksanakan 2 kegiatan yaitu Pertama, menyusun revisi road map, karena road map yang disusun pada tahun 2016 SKPD pelaksanaannya mengalami perubahan karena dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan adanya perampingan institusi dan rasionalisasi instansi pemerintah. Revisi Road Map telah diselesaikan pada tahun 2017 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Kedua, Pada tahun 2021 sesuai dengan tahun RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan disusun Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 selaras dengan RPJMD Pemprov Sumbar Tahun 2021-2026.

2. Sosialisasi Reformasi Birokrasi.

Setiap tahunnya secara rutin Biro Organisasi melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dengan materi yang mencakup Road Map Reformasi Birokrasi, Peraturan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, agen perubahan, rencana aksi dan evaluasi reformasi birokrasi.

3. Pembinaan Reformasi Birokrasi.

Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diberikan kepada 19 Kabupaten/kota yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan juga dilakukan untuk pengisian LKE untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pembinaan dilaksanakan mulai tahun 2019 setelah diketahui bahwa ada 6 Kab/kota yang tidak ada nilai RBnya. Setelah ditelusuri ternyata mereka belum mengerti tentang Pengisian LKE dan tahapan PMPRB. Setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2020 hanya 1 Kabupaten saja yang tidak ada nilai RBnya yaitu Kabupaten Solok Selatan.

4. Pembentukan Agen Perubahan

Untuk mempercepat terjadinya perubahan pola pikir dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap SKPD Provinsi Sumatera Barat dibentuklah agen perubahan yang ditetapkan melalui SK Kepala SKPD. Selanjutnya para agen perubahan telah menyusun rencana kegiatan yang dikenal dengan nama Rencana Tindak agen Perubahan. Rencana tindak ini sebagian telah terealisasi dengan baik.

5. Penyusunan Rencana Aksi

Untuk lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi telah disusun rencana aksi RB oleh OPD dan sebagian besar juga sudah dilaksanakan oleh OPD.

6. Evaluasi intern RB.

Setiap tahun telah dilaksanakan evaluasi intern RB untuk mempersiapkan pengisian LKE dalam rangka PMPRB.

e. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik.

Tuntutan masyarakat mengenai perlu dilakukannya pengembangan fungsi pelayanan publik telah menjadi wacana sampai saat ini sebagai salah satu upaya untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Usaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan dengan cara penerapan inovasi pelayanan publik sebagai suatu langkah yang positif untuk dilaksanakan dalam pengembangan fungsi pelayanan yang akan menjawab tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Penataan Ketatalaksanaan yang Efektif

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja, sehingga ketatalaksanaan terkait pula dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladaan, serta disiplin dan budaya kerja aparatur sendiri sendiri.

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah saat ini perlu untuk disederhanakan yang ditandai oleh adanya perubahan pada mekanisme, sistem, prosedur dan tata kerja agar dapat tertib, efisien dan efektif sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, dan proses pergerakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari ketatalaksanaan yang harus dilaksanakan, mulai dari penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja.

g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi komitmen dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat yang digulirkan dalam Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara di awal tahun 1998. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan salah satu prioritas pembangunan 2016-2021 yaitu Meningkatnya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah. Untuk terlaksananya Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi

dimaksud secara efektif dan efisien berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi.

h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan internal harus baik karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Dimensi yang sudah masuk kategori baik dan perlu dipertahankan adalah Kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, lingkungan kerja, komunikasi dan peralatan kerja; Terdapat dua indikator yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan, yaitu pendekatan interpersonal pimpinan dan sosialisasi perubahan kebijakan dan indikator kinerja.

Target indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana dijelaskan diatas tahun 2021-2026 selanjutnya dapat dilihat pada tabel T-C.25.

Tabel T.C 25.

Target Kinerja Biro Organisasi 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun -					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Persentase OPD yang tepat fungsi dan Tepat Ukuran			100	100	100	100	100	100
		Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran			100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100

				Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah			BB (76,50)	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	A (80,01)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	7	8	10	12	14	16
			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	11,7	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB			3,30	3,50	3,70	3,90	4,10	4,30
			Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1,71	1,78,	1,85	1,89	1,93	2,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			84	85	86	87	88	89
			Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional	5	7	9	11	13	15
			Penataan Ketatalaksanaan yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	8	12	16	18	20	22
5	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja			BB	BB (78)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (84)

	melayani									
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi			-	B (80)	B (86)	A (88)	A (90)	A (95)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BB	BB (78)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (84)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	-	B (80)	B (86)	A (88)	A (90)	A (95)



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan kebijakan, Biro Organisasi melaksanakannya dengan penentuan faktor eksternal dan internal dengan penentuan peluang serta tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun penentuan alternatif strategi tersebut adalah :

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Faktor Eksternal	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan, Jabatan dan Penataan Jabatan; - Komitmen dari perangkat daerah terkait penataan kelembagaan dan penataan jabatan; 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya tupoksi perangkat daerah yang tumpang tindih; - Pembagian tugas pegawai yang belum sesuai dengan jabatan - Tidak ada sanksi tegas atas ketidak sesuaian penataan kelembagaan yang dilakukan perangkat daerah. - Tidak adanya sanksi yang tegas atas ketidak sesuaian pembagian tugas pegawai dengan jabatan - Tidak adanya perbedaan tingkat kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja
Faktor Internal		

<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dalam mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta penataan jabatan yang efektif dan efisien; - Kesiapan data dan informasi pendukung dalam melakukan penataan kelembagaan dan penataan jabatan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan perundangan yang mengatur serta dukungan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dan penataan jabatan yang efektif dan efisien; - Komitmen dari pimpinan dan perangkat daerah memudahkan dalam pelaksanaan penataan kelembagaan dan penataan jabatan; - Dengan adanya komitmen perangkat daerah dalam pengumpulan data untuk penataan kelembagaan dan penataan jabatan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya kesepakatan di tingkat pembuat kebijakan internal dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak tersinkronisasi satu sama lain; - Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran sesuai ketentuan dan penataan jabatan yang efektif dan efisien.
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi pendukung untuk melakukan analisis dan evaluasi organisasi; - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis jabatan; - Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan dan jabatan secara menyeluruh dan tersistem. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan pemahaman atas peraturan perundangan untuk analisis dan evaluasi perangkat daerah secara proporsional; - Perlunya peningkatan pemahaman atas peraturan perundang-undangan untuk analisis dan evaluasi perangkat daerah secara proporsional - Perlunya menciptakan sistem evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terkait penataan kelembagaan dan jabatan pada Perangkat Daerah termasuk UPT yang ada di bawahnya. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan; - Meningkatnya kompetensi SDM dalam melakukan analisis jabatan; - Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan dan jabatan secara mendalam dan menyeluruh.

Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besarnya dukungan kepala daerah untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan terkait akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah - Perubahan dasar penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. - Adanya Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pergub 71 Tahun 2020) - Adanya Tim Akuntabilitas Kinerja di tingkat Provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah. - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2015 sudah memperoleh nilai evaluasi akuntabilitas kinerja prediket BB (>70). 	<p>Alternatif Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempedomani aturan/pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pergub 71 Tahun 2020) - Meningkatkan peran tim Akuntabilitas Kinerja di tingkat Provinsi dan di tingkat Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan tim evaluator dari Kementerian PAN dan RB - Merespon setiap perubahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran Bappeda dan Inspektorat dalam implementasi SAKIP - Tingkat pemahaman aparatur 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sinergi dengan Bappeda dan Inspektorat dalam implementasi SAKIP 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi SDM yang melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap

<p>terkait implementasi SAKIP masih belum merata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pemahaman aparatur dalam hal akuntabilitas kinerja di Perangkat Daerah belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah 	<p>akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat</p>
---	---	--

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besarnya dukungan kepala daerah untuk peningkatan Kualitas Laporan Kinerja/ Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan terkait Penyampaian Laporan Kinerja - Perubahan aturan yang mendasari Penyusunan dan
<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja /Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang diuraikan dalam Pergub 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Adanya Tim Penyusun Laporan Kinerja/Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 	<p>Alternatif Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mepedomani aturan/pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pergub 71 Tahun 2020) - Meningkatkan peran Tim Penyusun Laporan Kinerja/Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait

<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan informasi yang akan dijadikan dasar analisa pencapaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja/Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah - Kesulitan menyajikan program/kegiatan pendukung sasaran yang disajikan dalam Laporan Kinerja/Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan proses penganggaran yang menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. - Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyelaraskan program/kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai
--	---	--

**Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan**

<p>Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: right;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM aparatur ahli/terampil - Peningkatan Komitmen Pimpinan - Dukungan Anggaran Kegiatan 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Nilai area manajemen perubahan menjadi 2.00 - Kesesuaian Dokumen RB dengan pernyataan pada LKE - Pemahaman yang baik terhadap area manajemen perubahan
<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparatur yang mengerti dan terampil dalam pengisian LKE - Dukungan pemerintah pusat dalam konsultasi, fasilitasi dan pembinaan area manajemen perubahan - Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan yang relevan dan berfungsi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Sosialisasi, bimtek, asistensi dan pendampingan - Narasumber yang kompetitif dibidangnya - Dukungan media masa dalam pemuatan berita tentang area manajemen perubahan 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prediksi capaian nilai area perubahan sebelum PMPRB dilaksanakan - Konsultasi pemenuhan dokumen LKE untuk mendapatkan nilai maksimum pada area manajemen perubahan

dengan baik		
Kelemahan : - Pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan program/kegiatan reformasi birokrasi belum optimum - Dukungan pimpinan SKPD masih belum maksimal - Kesulitan dalam pengisian LKE karena aparatur pengisi LKE pengetahuannya belum sesuai dengan tuntutan pengisian LKE.	Alternatif Strategi : - Meningkatkan proses penganggaran sesuai dengan sasaran yang akan dicapai Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam pencapaian target area manajemen perubahan.	Alternatif Strategi : Menyelaraskan program/kegiatan dengan sasaran yang ingin dicapai

Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas

Faktor Eksternal	Peluang : - Sudah adanya peraturan perundangan tentang Pelayanan Publik; - Sudah adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang Inovasi pelayanan publik; - Kesadaran dan komitmen yang tinggi dari Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Tantangan : - Belum seluruh unit kerja pelayanan menciptakan inovasi untuk pengembangan pelayanan; - Kurangnya pemahaman aparatur pelayanan pada unit kerja pelayanan Provinsi dan Kabupaten / Kota akan pentingnya inovasi dalam pengembangan pelayanan publik;
Faktor Internal		
Kekuatan : - Adanya aturan dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima;	Alternatif Strategi : - Adanya peraturan perundangan yang mengatur	Alternatif Strategi : - Adanya himbauan dari pimpinan untuk menyelenggarakan

<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima; - Adanya komitmen pimpinan dalam menciptakan inovasi pelayanan; 	<p>penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan prima; - Kesiapan dari unit kerja pelayanan dalam menciptakan inovasi pelayanan publik. 	<p>pengembangan pelayanan publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya dilakukan bimbingan tentang pengembangan fungsi pelayanan melalui inovasi pelayanan publik; - Adanya himbauan dari pimpinan unit kerja pelayanan terkait pengembangan pelayanan public melalui inovasi pelayanan publik;
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Keterbatasan pemahaman akan pentingnya inovasi dalam pengembangan fungsi pelayanan public; 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan kompetensi bagi SDM dalam menyelenggarakan pelayanan publik; - Perlunya bimbingan dalam pengembangan pelayanan melalui inovasi pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi SDM dalam meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Penataan Ketatalaksanaan yang efektif

<p>Faktor Eksternal</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 100%;"/> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - udah adanya Peraturan yang mengatur Penataan Tatalaksana - Kesadaran dan Komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan Penataan Tatalaksana 	<p>Tantangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh perangkat daerah meningkatkan Pengaturan Penataan Ketatalaksanaan - Masih lemahnya koordinasi Pelayanan Tata Kelola Organisasi yang baik
---	--	--

<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan penataan ketatalaksanaan - Adanya kesiapan data dan informasi pendukung untuk meningkatkan penataan ketatalaksanaan yang baik 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman dalam mewujudkan penataan ketatalaksanaan - Menjaga komitmen dalam pelayanan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan peraturan 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya komitmen pimpinan dalam penataan ketatalaksanaan Organisasi yang baik - Perlu dilakukan bimbingan teknis dalam meningkatkan penataan ketatalaksanaan yang baik
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dalam memahami dan peraturan untuk meningkatkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik - Belum terlaksananya pengawasan dalam pelaksanaan ketatalaksanaan dengan baik 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan pemetaan bagi aparatur dalam penataan ketatalaksanaan sesuai aturan dan peraturan - Mengoptimalkan pengawasan penerapan ketatalaksanaan organisasi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik - Meningkatnya peranan pengawasan dalam penerapan ketatalaksanaan organisasi

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

<p>Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: right;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah adanya Peraturan yang mengatur Penataan Tata Kelola Organisasi - Kesadaran dan Komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan Penataan Tata Kelola Organisasi 	<p>Tantangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh perangkat daerah meningkatkan Pengaturan Tata Kelola yang baik - Masih lemahnya koordinasi Pelayanan Tata Kelola Organisasi yang baik
---	--	--

<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi - Adanya kesiapan data dan informasi pendukung untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik 	<p>Alternatif Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemahaman dalam mewujudkan Tata Kelola Organisasi - Menjaga komitmen dalam pelayanan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan peraturan 	<p>Alternatif Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik - Perlu dilakukan bimbingan teknis dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik
<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dalam memahami dan peraturan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang baik - Belum terlaksananya pengawasan intern dengan baik 	<p>Alternatif Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan pemetaan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan dan peraturan - Mengoptimalkan sosialisasi pengawasan intern organisasi 	<p>Alternatif Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang baik - Meningkatkan peranan pengawasan intern organisasi

Berdasarkan analisa di atas, dapat dirumuskan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran lima tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ditampilkan pada tabel T-C.26.

TABEL T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
MISI 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Melaksanakan Penataan Organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat Fungsi, tepat proses dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Melaksanakan pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
		Penetapan perangkat daerah Provinsi dengan pengkajian dan evaluasi ketepatan tupoksi dan urusan	Besaran organisasi Kab/Kota ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan
		Penetapan perangkat daerah Provinsi dengan pengkajian dan evaluasi ketepatan tupoksi dan urusan	Besaran organisasi Kab/Kota ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan.
		Mengendalikan pembentukan perangkat daerah melalui verifikasi dan fasilitasi	
		Penetapan jabatan pada Perangkat Daerah dengan metode Analisis Jabatan	Melaksanakan Analisis Jabatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan peran Tim Penyusun Laporan Kinerja/Analisa informasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Mempedomani aturan/pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 1. Perpres 29 tahun 2014 2. Permenpan 53 tahun 2014 3. Peraturan Gubernur No 71 tahun 2020
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda	Meningkatkan sinergi dengan Bappeda dan Inspektorat dalam implementasi SAKIP	

		Meningkatkan pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas	
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Meningkatkan pemahaman aparatur tentang manajemen perubahan	Melaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi area manajemen perubahan
		Meningkatkan pembinaan reformasi birokrasi area manajemen perubahan	Asistensi ke kabupaten/kota dan OPD Provinsi Sumatera Barat
		Pembentukan agen perubahan Reformasi Birokrasi	SK Agen Perubahan
		Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi area manajemen perubahan	Surat Edaran tentang keharusan menyusun rencana aksi OPD dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan
		Melaksanakan evaluasi intern reformasi birokrasi	SK Tim Assesor Internal OPD
		Menyusun rencana kerja area manajemen perubahan pada Road Map Reformasi birokrasi	Pergub tentang Road Map Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Melaksanakan peningkatan kompetensi bagi SDM dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik
		Melaksanakan bimbingan dalam pengembangan pelayanan melalui inovasi pelayanan	Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik
		Melaksanakan peningkatan pemahaman bagi aparatur dalam penataan ketatalaksanaan sesuai aturan dan peraturan	Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik

	Penataan Ketatalaksanaan yang efektif	Mengendalikan pengawasan penerapan ketatalaksanaan organisasi	Meningkatnya peranan pengawasan Organisasi
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatkan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran yang sesuai dengan dokumen rencana strategis	Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pelayanan pada internal organisasi	Melaksanakan pelayanan yang berkualitas pada internal organisasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dalam periode 5 tahun kedepan, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatifnya dapat digambarkan dengan 5 (lima) tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut disusunlah sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan
5. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas
6. Penataan ketatalaksanaan yang efektif
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
8. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, didukung oleh oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Mebeleur
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II PENATAAN ORGANISASI

j. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
- Penataan Analisis Jabatan

k. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, mengacu kepada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka														Unit Kerja Penganggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
SETDA BIRO ORGANISASI							2,905,388,495		3,096,518,254		4,593,371,000		4,706,264,000		4,872,735,000		5,106,146,000		25,282,422,749	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95%	100%	624,313,945	100%	629,999,112	100%	1,491,869,602	100%	931,840,000	100%	945,840,000	100%	1,001,146,000	100%	5,625,008,659.0	Bag. Ketatalaksanaan
Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitasnya Kinerja Organisasi		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	11,976,600	100%	11,976,600	100%	30,500,000	100%	31,000,000	100%	32,500,000	100%	34,000,000	100%	151,953,200.0	Bag. Ketatalaksanaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP OPD, LKPJ, LPPD OPD, LAP KEU BIRO, Lap Realisasi Anggaran, Renstra, Renja, Penetapan Kinerja Biro dan Laporan Aset yang disusun	10 Dok	10 Dok	11,976,600												11,976,600.0	
				Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun				10 Dok	11,976,600										11,976,600.0	
				Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun						3 Dok	7,640,000	3 Dok	8,000,000	3 Dok	9,000,000	3 Dok	9,000,000	32 Dok	24,640,000.0	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dok	10,860,000	1 Dok	11,000,000	1 Dok	11,000,000	1 Dok	12,000,000	4 Dok	32,860,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,000,000	1 Dok	7,500,000	4 Dok	21,000,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,500,000	1 Dok	5,500,000	4 Dok	15,500,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	135,645,582	100%	162,680,094	100%	138,030,700	100%	138,300,000	100%	140,240,000	100%	141,340,000	100%	856,236,376.0	Bag. Ketatalaksanaan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	60 Bulan	60 Bulan	1,199,850												1,199,850	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target	Rp (jt)
				Jumlah ASN yang mendapatkan Honor				10 Orang	111,120,000	10 Orang	126,840,000	10 Orang	127,000,000	10 Orang	128,840,000	10 Orang	129,840,000	50	493,800,000		
				Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang disusun			1 Dokumen	51,560,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,560,094		
				koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya pembayaran Honorarium KPA, PPTK, Bendahara dan PTT		12 Bulan	134,445,732													
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan		-	-	-	10 Dokumen	2,000,000	10 Dokumen	2,000,000	10 Dokumen	2,000,000	10 Dokumen	2,000,000	40 Dok	6,000,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun		-	-	-	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,000,000	4 Laporan	9,000,000		
				Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tidak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan		-	-	-	1 Laporan	2,190,700	1 Laporan	2,300,000	1 Laporan	2,400,000	1 Laporan	2,500,000	4 Laporan	6,890,700		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan /Triwulan/ Semesteran yang disiapkan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disiapkan		-	-	-	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	12 Laporan	12,000,000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	13,999,700	100%	2,239,700	100%	11,600,000	100%	12,600,000	100%	12,600,000	100%	12,700,000	100%	65,739,400	Bag. Ketatalaksanaan
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honorarium Pengelola Aset Daerah	12 Bulan	12 Bulan	13,999,700			-	-	-	-	-	-	-	-	13,999,700		
					Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	2,239,700			-	-	-	-	-	-	-	2,239,700		
					Jumlah Dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD			-	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	5 Dok	9,500,000		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Usulan RPJMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun			-	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	4 Dok	9,500,000		
				Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penertiban			-	-	1 Dokumen	5,600,000	1 Dokumen	5,600,000	1 Dokumen	5,600,000	1 Dokumen	5,700,000	4 Dok	22,500,000		
					Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya			-	-	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		4 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp (jt)
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	4 Dok	8,000,000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0	100%	23,164,000	100%	16,000,000	100%	22,000,000	100%	23,000,000	100%	25,000,000	100%	109,164,000.0	Bag. Ketatalaksanaan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	-	-	-	2 Kali	29,164,000	6 Kali	10,000,000	12 Kali	22,000,000	13 Kali	23,000,000	15 Kali	25,000,000	48 Kali	109,164,000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	292,897,795	100%	272,707,368	100%	487,890,123	100%	540,999,840	100%	545,000,000	100%	556,000,000	100%	2,695,495,126.0	Bag. Ketatalaksanaan	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Makanan, dan Minuman Rapat	12 Bulan	12 Bulan	52,907,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,907,800		
				Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	12 Bulan	38,668,445	5 Jenis	52,865,200	5 Jenis	53,000,000	5 Jenis	54,000,000	5 Jenis	54,000,000	20 Jenis	252,533,645		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang menunjang Operasional Kantor	12 Bulan	12 Bulan	35,020,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,020,400		
				jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	12 Bulan	35,024,923	5 Jenis	35,024,923	5 Jenis	35,999,840	5 Jenis	36,000,000	5 Jenis	37,000,000	20 Jenis	179,049,686		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	204,969,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,969,595		
				jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	-	-	-	1 Dokumen	199,014,000	70 Laporan	400,000,000	80 Laporan	452,000,000	85 Laporan	455,000,000	90 Laporan	465,000,000	325 Laporan	1,971,014,000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	29,316,000	100%	19,000,000	100%	630,302,560	100%	0	100%	0	100%	38,306,000	100%	716,924,560.0	Bag. Ketatalaksanaan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop/PC dan Printer yang diadakan	2 Unit	2 Unit	29,316,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,316,000		
				Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Baru	-	-	-	3 Unit	19,000,000	12 Unit	471,275,660	-	-	-	-	5 Unit	38,306,000	22 Unit	528,581,660		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	25 Unit	159,026,900	-	-	-	-	-	-	25 Unit	159,026,900		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp (jt)
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target	Rp (jt)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeriksaan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	52,448,268	100%	48,541,350	100%	90,256,219	100%	92,840,160	100%	95,500,000	100%	96,800,000	100%	476,385,997.0	Bag. Ketatalaksanaan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Sarana Surat Menyurat dan Honoror Tenaga Administrasi	12 Bulan	12 Bulan	48,248,268												48,248,268		
				Jumlah Surat masuk dan keluar dalam 1 tahun		12 Bulan		45,541,350	600 Surat	13,303,675	650 Surat	14,000,000	650 Surat	15,000,000	650 Surat	15,800,000	2550 Surat		103,645,025		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	4,200,000												4,200,000		
				Jumlah Rekening Tagihan Telepon/Fax yang dibayarkan		12 Bulan		3,000,000											3,000,000		
				Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan					10 Mbps	3,000,000	10 Mbps	3,000,000	10 Mbps	3,500,000	10 Mbps	3,500,000			13,000,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	-	-	-	-	2 Orang	73,952,544	2 Orang	75,840,160	2 Orang	77,000,000	2 Orang	77,500,000			304,292,704		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	100%	100%	88,030,000	100%	83,690,000	100%	93,290,000	100%	94,100,000	100%	97,000,000	100%	97,000,000	100%	553,110,000.0	Bag. Ketatalaksanaan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	39,190,000												39,190,000		
				Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				1 Unit	39,190,000	1 Unit	39,190,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	41,000,000	1 Unit	41,000,000	6 Unit	200,380,000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Unit	1 Unit	34,100,000												34,100,000		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara				1 Unit	34,100,000	3 Unit	34,100,000	3 Unit	34,100,000	3 Unit	36,000,000	3 Unit	36,000,000	14 Unit	174,300,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025				2026		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target	Rp (jt)	Target
				Persentase Jumlah Rekomendasi Penataan Kelembagaan yang Dikeluarkan					80%	394.752,600	100%	438.000,000	100%	446.000,000	100%	455.000,000		1.733.752,600		
			Penataan Analisis Jabatan	Tersusunnya Penataan Jabatan Perangkat Daerah dan Pembinaan Penataan Jabatan Pada Kab/Kota	30 SK Gubernur	30 SK Gubernur	304.486,100	1 Laporan	356.043,450										660.529,550	
				Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Penataan Jabatan					80%	399.128,000	90%	438.000,000	100%	446.000,000	100%	455.000,000		1.738.128,000		
				Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina Penataan Jabatan					80%		90%		100%		100%					
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	8	8	1.015.477,300	12	1.386.202,578	16	1.922.754,328	18	2.460.424,000	20	2.588.895,000	22	2.740.000,000		12.113.753,206	Bagian Akuntabilitas dan Reformasi
				Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	7	7		8		10		12		14		16				
				Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik UKPP yang menciptakan Inovasi	5	5		7		9		11		13		15				
Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peserta Bimtek Agen Perubahan	104 Orang	104 Orang	254.096,100		305.755,000		331.548,000	-	408.000,000		424.474,166		450.000,000		2.173.873,266	
				Penyusunan Draft Road Map RB	1 Dokumen	1 Dokumen		-		-		-		-		-		-		
				Jumlah Peserta Bimtek Pokja 8 Area Manajemen				30 Orang						30 orang						
				Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi	18 Kab/Kota	18 Kab/Kota		18 Kab/Kota		19 Kab/Kota		19 Kab/Kota		19 Kab/Kota		19 Kab/Kota				
				Jumlah Peserta Sosialisasi Road Map RB	63 Orang	63 Orang		104 Orang		104 Orang		104 Orang								
				Jumlah Dokumen Purgub Road Map RB Pemprov. Sumber 2021-2026	-	-		1 Dokumen												
				Jumlah Dokumen Monev Purgub Road Map RB Pemprov. Sumber 2021-2026	-	-				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen				
				Pembahasan Materi RB OPD	-	-				51 OPD		51 OPD		51 OPD		-				
				Jumlah Peserta Sosialisasi RB	-	-										150 orang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp (jt)
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)				
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Pemantauan Pelaksanaan Budaya Kerja	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	56.554.500	1 Pergub	119.095.650		132.104.750		340.000.000		346.000.000		370.000.000		1.363.754.900		
				Jumlah Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja				1 Pergub			-								0		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Pergub Budaya Kerja				60 Orang		60 Orang				19 Kab/Kota							
				Jumlah OPD yang mengikuti Monev Pergub Budaya Kerja						51 OPD				51 OPD							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	293.549.150	1 Dokumen	339.276.047	1 Dokumen	368.288.150	1 Dokumen	458.000.000	1 Dokumen	462.000.000	1 Dokumen	470.000.000		2.391.113.347		
				Jumlah Kab/Kota yang dibina Implementasi SAKIPnya	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota		-		-											
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		-		-											
				Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali					
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan Pemahamannya tentang SAKIP (OPD dan Kab/Kota)	100 Orang	100 Orang		-		-											
				Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			0		
				Jumlah Kabupaten/Kota yang dioscehing (asistensi Dokumen SAKIPnya)				2 Kab/Kota		6 Kab/Kota		2 Kab/Kota		2 Kab/Kota		2 Kab/Kota					
				Jumlah Peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang SAKIP (Tim Penguatan SAKIP Provinsi)				30 Orang		30 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang					
				Jumlah Peserta Percepatan Implementasi SAKIP Prov. Sumbang						110 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang					
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Implementasi SAKIP	-						51 OPD		51 OPD		51 OPD		51 OPD				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Biro Organisasi	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp (jt)
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas		Pengelolaan Tataletaksana Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	194,122,750		245,334,734		390,813,428		504,424,000		556,420,834		600,000,000		2,491,115,746		
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan Probis			4 Perangkat Daerah			10 Perangkat Daerah			10 Perangkat Daerah			10 Perangkat Daerah					
				Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam Penyusunan SOP			4 Perangkat Daerah			7 Perangkat Daerah			7 Perangkat Daerah			7 Perangkat Daerah					
				Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kabupaten/Kota			6 Kab/Kota			7 Kab/Kota			7 Kab/Kota			7 Kab/Kota					
Penataan Ketataleaksanaan yang efektif			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	10 UKPP	10 UKPP	217,154,800		376,741,147		700,000,000		750,000,000		800,000,000		850,000,000		3,693,895,947		
				Jumlah Inovasi Layanan Publik yang diinput dalam sistem	-	-			50 Inovasi			-			-						
				Jumlah Peserta Digitalisasi Pelayanan Publik	-	-			110 orang			100 Orang			100 Orang						
				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan	-	-			50 UKPP			75 UKPP			75 UKPP						
				Jumlah UKPP yang Menerapkan SIPP	-	-			20 UKPP			75 UKPP			75 UKPP						
				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan	-	-			20 UKPP			75 UKPP			75 UKPP						
				Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	-	-			20 UKPP			75 UKPP			75 UKPP						



KINERJA PENYELENGGARAAN BIRO ORGANISASI

Terselenggaranya Pemerintah yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, disamping itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, dan untuk itu setiap Pemerintah Daerah harus dapat menetapkan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan yang terukur sehingga akan tercipta Legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh individu atau lembaga. Untuk mewujudkan kinerja yang valid, Biro Organisasi menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penyusunan sasaran strategis beserta Indikator yang dapat diukur. Pendekatan penentuan kinerja tersebut adalah :

1. Membuat pohon kinerja (Cascading),
2. Membedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk Kinerja penyelenggaraan yang baik dan Akuntabel juga harus memperhatikan 4 (Empat) Variable yaitu:

- a. Tercapainya Prinsip Pengelolaan Kinerja Berorientasi Hasil
- b. Adanya Keselarasan artinya memiliki keterkaitan sebab akibat dan sinergitas
- c. Adanya ukuran kinerja yang terukur dan relevan
- d. Adanya Target kinerja yang terukur dan logis

Pohon Kinerja dalam konteks manajemen artinya adalah suatu penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang diturunkan serta dipastikan dan diyakinkan

akan menghasilkan apa yang akan dicapai dan sasaran strategis, Indikator Utama dan target indicator yang selaras baik secara vertical maupun horizontal.

Sasaran Biro Organisasi periode 2021 sampai dengan 2026 yang dikaitkan dengan tujuan pohon kinerja terdapat 7 (Tujuh) Sasaran strategis yang akan dicapai Biro Organisasi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun, adapun sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table T-C.28. berikut ini

TABEL T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Pada Periode RPJMD	Target Capaian Sasaran pada Tahun -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Kab/Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100	100	100	100	100
3.	Perangkat Daerah yang memiliki nilai Evaluasi SAKIP A	7	8	10	12	14	16	16
4.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	11,7	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,3
5.	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1,71	1,78	1,85	1,89	1,93	2,00	2,00
6.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Lolos saringan kompetisi secara Nasional	5	7	9	11	13	15	15
7.	Jumlah Perangkat Daerah yang	8	12	16	18	20	22	22

	melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan							
8.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	BB (78)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (84)	A (84)
9.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	-	B (80)	B (86)	A (88)	A (90)	A (95)	A (95)

A stylized graphic featuring a blue circle on the left, a white vertical bar with a blue square at its top and bottom, and a blue horizontal bar with a white square at its left end. The text 'BAB VIII' is written in blue serif font across the white square of the horizontal bar. A dark blue arrow-like shape points to the right from the end of the horizontal bar.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, berarti Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 – 2026. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Bagian di Lingkungan Biro Organisasi selama kurun waktu 2021 – 2026 agar mempedomani Renstra ini.